

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Kecamatan Sarolangun. Sarolangun resmi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1999 yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur. Luas wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010 sebanyak 247.618 jiwa dengan kepadatan penduduk 40 jiwa/km², rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 3,32 persen. Dan jumlah penduduk Sarolangun tahun 2020 berjumlah 290.047 jiwa dengan kepadatan 45 jiwa/km². Peningkatan jumlah penduduk seiring perkembangan zaman Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari kebutuhan penyediaan hunian bagi masyarakat. Salah satunya kebutuhan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah pusat Kota Sarolangun. Kecamatan Sarolangun yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Sarolangun memiliki peran penting dalam memangku perekonomian rakyat Sarolangun, lokasi yang menghubungkan banyak wilayah di Kabupaten Sarolangun sehingga menjadi pilihan banyak warga untuk bekerja dan bermukim.

Besarnya permintaan permukiman di Kabupaten Sarolangun dibuktikan dengan tingginya peralihan fungsi lahan menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan wilayah permukiman baru. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sarolangun berdasarkan data BPS Sarolangun tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 jumlah PNS 4500 orang, yang tidak memiliki hunian 57% atau 2565 orang, pada tahun 2019 jumlah PNS 4501 orang, yang tidak memiliki hunian 55% atau 2476 orang, pada tahun 2020 jumlah PNS 4559 yang tidak memiliki hunian 53% atau 2416 orang. Pada tahun 2020 terdapat penurunan PNS yang tidak memiliki hunian dari tahun 2018 dari 57% menjadi 53%, namun tetap saja masih ada PNS yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun.

Untuk mengatasi masalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun, pemerintah Sarolangun mengeluarkan kebijakan perencanaan rusunawa. Perencanaan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	1	6
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	7	12
Dinas Perhubungan	13	2	15
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	4	7
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	9	13

rusunawa merupakan respon terhadap kebutuhan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki hunian. Kebijakan perencanaan rusunawa tersebut merupakan salah satu alternatif dalam penanganan permasalahan perumahan dan pemukiman di Sarolangun. Dengan adanya kebijakan tersebut Perencanaan rusunawa ini khusus memfasilitasi PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun yang tidak memiliki hunian.

Dengan adanya bangunan Rusunawa PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun optimisakan menjadi solusi kurangnya unit rumah bagi PNS yang tidak memiliki hunian. Maka keberadaan Rumah Susun Sewa di Kabupaten Sarolangun sejatinya di tujukan untuk dapat mengurangi Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun.

1.1.1. Data

Tabel 1.1. Data Jumlah PNS Yang Tidak Memiliki Hunian Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sarolangun

Dinas/Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sekretaris			
Sekretaris Daerah	3	1	4
Sekretaris DPRD	4	2	6
Badan			
Inspektorat	4	1	5
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	6	2	8
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	1	7
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7	3	10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	3	8
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	6
Kantor			
Kantor Kecamatan	84	24	108
Kantor Kelurahan	24	8	32
Kantor Kesbangpol	4	3	7
RSUD	26	52	76
Satpol-PP	11	2	13
Dinas			
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	4	14
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	5	9
Dinas Kesehatan	84	96	180
Dinas Ketahanan Pangan	7	2	9
Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	3	8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindag	8	7	15
Dinas Lingkungan Hidup	8	11	19

Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9	5	14
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	773	928	1701
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6	5	11
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-
Dinas Peternakan dan Perikanan	8	5	13

Dinas PU dan Penataan Ruang	-	-	-
Dinas Sosial	6	2	8
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	36	22	60
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5	12
Total	1189	1227	2416

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, Tahun 2020

Tabel 1.2. Data Jumlah PNS Yang Tidak Memiliki Hunian Berdasarkan Status Perkawinan Di Kabupaten Sarolangun

Dinas/Instansi	Status Perkawinan				Jumlah
	Menikah	Belum Menikah	Duda	Janda	
Dinas Kesehatan	98	38	20	24	180

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, Tahun 2020

Tabel 1.3. Kriteria Penghuni Rusunawa PNS Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sarolangun

No.	Kriteria Penghuni Rusunawa PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun
1.	Khusus Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun
2.	PNS Dinas Kesehatan yang memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi Rusunawa
3.	PNS Dinas Kesehatan yang masih aktif
4.	PNS Dinas Kesehatan baru berumah tangga dan belum mampu membeli rumah
5.	PNS Dinas Kesehatan yang belum mendapat kesempatan memiliki rumah yang dibangun oleh perumnas atau membangun sendiri
6.	PNS Dinas Kesehatan yang tinggal tidak menetap (sementara) karena pekerjaannya. Kalaupun mereka dapat memperoleh KPR, kemungkinan sulit untuk menempati kalau mereka harus
7.	PNS Dinas Kesehatan menggunakan sistem sewa, bukan diperjual belikan atau lainnya

Sumber : Hasil Analisa Penulis, Tahun 2021

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Permasalahan Non Arsitektural

- Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun tidak memiliki hunian
- Desain fasad bangunan yang memberi keindahan visual dan kenyamanan penghuni.

- Apakah aktivitas yang dilakukan oleh PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun di lingkungan Rusunawa?
- Bagaimana peran Rusunawa dalam membangun kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun

1.2.2. Permasalahan Arsitektural

- Bagaimana merencanakan Rusunawa untuk Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun?
- Apakah kebutuhan ruang yang diperlukan di dalam maupun di luar Rusunawa PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun?
- Apakah sarana prasarana serta fasilitas yang menunjang perencanaan Rusunawa PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun?

1.3. Tujuan Penelitian

- Menunjang pembangunan Rusunawa PNS Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun
- Menghasilkan desain Rusunawa Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun
- Memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, aman, nyaman untuk Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun yang belum memiliki hunian di Kabupaten Sarolangun

1.4. Sasaran Penelitian

Sasaran yang akan dihasilkan dari proses perencanaan ini berupa acuan konsep dan desain, yang meliputi :

- Pengolahan tapak bangunan,
- Denah ruang,
- Tampak dan Bentuk bangunan,
- Rencana pendukung dan kelengkapan bangunan,

1.5.1. Ruang Lingkup Spasial (Kawasan)

Ruang lingkup pembahasan kawasan, Perencanaan Rusunawa PNS Dinas Kesehatan di

Kabupaten Sarolangun terletak di Jalan Jenderal Soedirman, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

1.5.2. Ruang Lingkup Substansial (Kegiatan)

Ruang lingkup substansial dari perencanaan Rusunawa Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun didapatkan dari:

Mengidentifikasi permasalahan di Kabupaten Sarolangun, melakukan observasi lapangan, menganalisa aktivitas dan kegiatan pelaku, menganalisis kebutuhan ruang, menelaah data yang di dapat, mengembangkan rumusan konsep desain.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penulisan seminar ini terdiri dari 8 bab, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematis pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan teori yang akan digunakan dalam perencanaan, review jurnal, dan review preseden desain.

BAB III: METODA PENELITIAN DAN PERENCANAAN

Membahas tentang pendekatan penelitian, subjek penelitian, jadwal penelitian, kriteria memilih lokasi, dan alternatif lokasi

BAB IV: TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN

Membahas tentang tinjauan kawasan terpilih mulai dari data hingga analisis Permasalahan dalam kawasan tersebut.

BAB V: ANALISA

Membahas tentang analisa ruang luar dan ruang dalam yang menghasilkan kebutuhan ruang

BAB VI: KONSEP PERANCANGAN

Membahas konsep tapak dan konsep bangunan

BAB VII: PERENCANAAN TAPAK

membahas tentang site plan yang sesuai dengan konsep dan analisa

BAB VIII: PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran